Original Article



Journal of Tropical Medicine and Public Health 2023;1(1): 6-10 • https://doi.org/......

e-issn:

Gambaran Mitigasi Covid-19 di Provinsi Bali Guna Menciptakan Kawasan Pariwisata Sehat di Era New Normal Overview of COVID-19 Mitigation in Bali Province to Create Healthy Tourism Areas in the New Normal Era

Raissa Rahmadina Pristiwanda¹*,Eksanti Kusuma Wardani²*, Nita Widiyanti³*

¹²Prodi Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember, Jember ³Dinas Sosial, Lumajang

Corresponding author: Raissa Rahmadina Pristiwanda name and affiliation: Prodi Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember, Jember E-mail: raissapristiwandha@gmail.com

Abstract

Objectives: COVID-19 is a respiratory disease that has become a pandemic throughout the world. Indonesia is the country with the highest number of COVID-19 cases in Southeast Asia. The most obvious impact of COVID-19 is in the tourism sector. Bali as the province with the largest main income in the tourism sector has experienced negative economic growth due to restrictions on COVID-19 activities. Along with the discovery of the vaccine, tourism in Bali is slowly starting to recover with the implementation of the new normal. This study aims to see the picture of COVID-19 mitigation in Bali Province in order to create a healthy tourism area in the new normal era.

Methods: The research method is descriptive by conducting a literature study.

Results: The results show that Bali Province implements a disaster management system in dealing with COVID-19. COVID-19 mitigation is a stage in disaster management. COVID-19 mitigation is carried out by conducting COVID-19 surveillance. In addition, the Bali Provincial Health Office is integrated with the Bali Port Health Office (KKP) and PT. Angkasa Pura I to carry out the COVID-19 protocol for tourists who will enter Bali.

Conclusions: it is hoped that in the future the Bali Provincial Health Office can expand its surveillance network and partnerships with existing NGOs.

Keywords: Mitigation, Covid-19, Tourism

Received: Jan 15, 2023 Revised: Feb 21, 2023 Accepted: Mar 15, 2023

METHODS

Penyakit Coronavirus (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Orang yang terinfeksi virus akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Cara terbaik untuk mencegah dan memperlambat penularan adalah dengan mengetahui dengan baik tentang penyakit dan bagaimana virus menyebar. Pencegahan yang dimaksud adalah menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain, mengenakan masker yang pas, dan sering mencuci tangan atau menggunakan gosok berbasis alkohol. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi dalam partikel cair kecil saat mereka batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernapas [1].

Awal tahun 2020 hampir semua negara di dunia termasuk di Indonesia mengalami guncangan yang sangat berat akibat COVID-19 [2]. World Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi di seluruh dunia pada 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020 [1]. Lebih dari 2.000.000 kasus covid-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh (Kemenkes, 2020). Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat kasus COVID-19 tertinggi di Asia tenggara [3]. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, COVID-19 juga menyebabkan dampak sosial, ekonomi, pendidikan dan dampak perubahan perilaku dan gaya hidup [4].

Lebih dari enam dekade terakhir, pariwisata telah mengalami ekspansi dan diversifikasi terus menerus, menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar dan pertumbuhan tercepat di dunia [5]. Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah yang menjadi destinasi utama baik nasional maupun internasional. Pariwisata Bali telah tumbuh dan berkembang sedemikian rupa memberikan sumbangan yang besar terhadap pembangunan daerah dan masyarakat Bali baik secara langsung maupun tidak langsung [2].

COVID-19 Pandemi juga menunjukkan dampaknya di sektor pariwisata. Tekanan terhadap sektor pariwisata yang disebabkan oleh penyakit akibat virus korona baru (Covid-19) diyakini berdampak pada perekonomian Bali. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menyebutkan, ekonomi Bali dalam tiga bulan pertama (triwulan I) 2020 tumbuh negatif, yakni -1,14 persen, dibandingkan kondisi tahun lalu pada triwulan I-2019. Pertumbuhan minus ini berada di luar dugaan dan ini disebabkan oleh merebaknya wabah virus corona yang mempengaruhi pergerakan masyarakat secara individu maupun secara sosial. ekonomi dan lingkungan. (Purwahita. Wardhana, Ardiasa, & Winia, 2021) Hal ini ditunjukkan banyaknya wisata dan hotel yang tutup dan membatasi aktifitas kunjungannya [6].

Seiring ditemukannya vaksin COVID-19 dan menurunnya jumlah kasus COVID-19 perlahan kegiatan masyarakat di Indonesia mulai membaik [6]. Pemerintah menetapkan kondisi tersebut sebagai kondisi new normal dari COVID-19 sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dan protokol kesehatan New Normal sesuai dengan Keputusan Kesehatan HK.01.07/MENKES/328/2020. Industri pariwisata saat ini mengutamakan penerapan standar protokol kesehatan dan standar keamanan yang dipandang memadai untuk tetap menjaga kenyamanan para wisatawan berkunjung ke Bali [4]. Namun kondisi ini tidak membuat lengah Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam pencegahan COVID-19. Mengingat virus SARS-CoV-2 masih ada di wilayah Bali ditunjukkan dengan masih adanya pasien yang terpapar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan upaya mitigasi penyebaran COVID-19 untuk menghindari lonjakan kasus yang tinggi sehingga Provinsi Bali menjadi wilayah wisata yang sehat di era new normal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian termasuk analisis masalah atau metode desain yang digunakan untuk memecahkan masalah. Analisis masalah menggambarkan masalah yang ada dan terselesaikan dalam penelitian ini. Desain menggambarkan bagaimana memecahkan masalah dan harus disajikan dalam bentuk diagram dengan penjelasan lengkap.

HASIL PENELITIAN

Jumlah kasus positif COVID-19 di seluruh Provinsi Bali pada kuartal pertama tahun 2023 mencapai 173.670 orang. Jumlah pasien meninggal akibat virus corona sebanyak 4.907 orang, dan 186 masih sakit (positif aktif), serta 168.577 orang dinyatakan sembuh. Kota Denpasar merupakan kota dengan jumlah kasus positif tertinggi di seluruh Provinsi Bali yaitu 35.785 orang, sedangkan Kabupaten Klungkung menjadi kabupaten dengan angka kasus positif terbanyak di Provinsi Bali yaitu 37.317 kasus. Kota Denpasar juga menjadi kota dengan jumlah meninggal tertinggi di seluruh Provinsi Bali yaitu 892 pasien, sedangkan Kabupaten Badung merupakan kabupaten dengan jumlah meninggal terbanyak di seluruh Provinsi Bali yaitu 588 orang.

Upaya penanggulangan COVID-19 di Provinsi Bali saat ini masih digencarkan, mengingat Bali merupakan destinasi wisata utama yang banyak dituju oleh wisatawan baik domestic maupun wisatawan asing. Sejak diberlakukannya new normal, banyak wisata di Bali yang mulai dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Pembukaan destinasi wisata ini kembali menarik wisatawan untuk berkunjung. Banyaknya kunjungan mengakibatkan banyaknya kontak antar individu yang berpotensi membawa virus

SARS-CoV-2 dari luar Provinsi Bali. Potensi penyebaran virus ini membawa dampak yang berbahaya baik bagi warga lokal bali maupun sesame wisatawan, sehingga diperlukan upaya pencegahan berupa mitigasi COVID-19

COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana dunia oleh WHO pada tahun 2020. Indonesia khususnya Provinsi Bali menerapkan manajemen bencana dalam penanggulangan pandemic COVID-19 seperti pada siklus sebagai berikut:

SIKLUS MANAJEMEN BENCANA



Gambar 1. Siklus manajemen bencana berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

PEMBAHASAN

Berdasarkan siklus tersebut yang telah diterapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali adalah sebagai Berikut:

1. Tahap Pra Bencana

Dalam fase pra bencana ini mencakup kegiatan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini.

- a. Pencegahan (*Prevention*)
 - Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya COVID-19. Memasuki era new normal setelah ditemukannya vaksinasi COVID-19, saat ini Provinsi Bali menggencarkan program vaksinasi COVID-19 di semua kalangan. Hal ini ditunjukkan dengan capaian vaksinasi COVID-19 di Provinsi Bali mencapai 93 %.
- b. Mitigasi Bencana (Mitigation)
 - Mitigasi adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman COVID-19. Saat ini Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengoptimalkan fasilitas pelayanan kesehatan utamanya rumah sakit untuk menyediakan layanan COVID-19. Rumah Sakit layanan Covid-19 di Bali harus lakukan langkah siaga satu. Tujuannya agar bisa mengendalikan penyebarannya, dan bisa mengambil tindakan

strategis untuk menyelamatkan nyawa masyarakat. Selain itu Dinas Kesehatan provinsi Bali juga menetapkan upaya edukasi dan sosialisasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19 telah mendorong pemahaman dan pelaksanaan masyarakat untuk melakukan vaksinasi, menjaga protokol kesehatan pasca vaksinasi dan menangani kipi

- c. Kesiapsiagaan (*Preparedness*)
 - Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Bali melakukan pengorganisasian dengan sinkronisasi data COVID-19 sebagai dasar gambaran kasus COVID-19, sehingga kedepannya dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat menghadapi lonjakan kasus COVID-19.
- d. Peringatan Dini (Early Warning)
 - Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin pada masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang atau upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini ini harus menjangkau masyarakat (accessible), segera (immediate), tegas tidak membingungkan (coherent), bersifat resmi (official). Dinas Kesehatan Provinsi Bali melakukan pemberian edukasi dan informasi melalui situs dan official account Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebagai informasi peringatan dini terhadap COVID-19, vaksinasi, kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), dan sebagainya. Tujuannya adalah menghindari adanya hoax di masyarakat serta meningkatkan kewaspadaan di masyarakat.

2. Tahap Saat Terjadi Bencana

Dalam tahap ini mencakup tanggap darurat dan bantuan darurat

- a. Tanggap Darurat (response)
 - Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Sebagai langkah awal penanggulangan COVID-19. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan Surveilans kesehatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 45 tahun 2014 tentang penyelenggaraan surveilans kesehatan, Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien [7].
- b. Surveilans
 Dinas Kesehatan Provinsi Bali merupakan suatu

sikap waspada dan tanggap darurat untuk segera melakukan tindakan. Kapasitas Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam hal ini meliputi kecepatan mendeteksi secara dini, kecepatan merespon, dan kecepatan berbagi data dan informasi. Surveilans yang dilakukan memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

- Tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya serta masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan
- Terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB/Wabah dan dampaknya
- Terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB/Wabah
- Dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan

Penyelenggaraan sistem surveilans Dinas Kesehatan Provinsi Bali dilakukan sebagai berikut :

- a) Surveilans Berbasis Indikator
- b) Indikator yang dimaskud adalah laporan rutin penyakit, termasuk sistem pelaporan penyakit yang telah ditentukan, surveilans sentinel yang umumnya berbasis fasilitas pelayanan kesehatan Laporan mingguan, bulanan
- c) Surveilans Berbasis Kejadian

Surveilans berbasis kejadian umumnya didasarkan pada deteksi cepat, laporan, konfirmasi, assessment kejadian kesehatan termasuk masyarakat, rumor penyakit/kematian yang tidak jelas umumnya laporan langsung. Surveilans yang dilakukan oleh dinas kesehatan merupakan bagian dari surveilans penyakit infeksi emerging. Dimana data yang dikumpulkan dilakukan dengan 2 cara yaitu secara aktif dan pasif. Pengumpulan aktif secara dilakukan dengan mendapatkan data secara langsung dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, masyarakat atau sumber data lainnya,melalui kegiatan Penyelidikan Epidemiologi, surveilans aktif puskesmas/rumah sakit, survei khusus, dan kegiatan lainnya Pengumpulan secara pasif dilakukan dengan cara menerima data dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, masyarakat atau sumber data lainnya, dalam bentuk rekam medis, buku register pasien, laporan data kesakitan/kematian, laporan kegiatan, laporan masyarakat dan bentuk lainnyaa.

Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan cara perekaman data, validasi, pengkodean, alih bentuk (transform) dan pengelompokan berdasarkan tempat, waktu, dan orang. Kemudian analisis data dilakukan dengan metode epidemiologi deskriptif dan/atau analitik untuk menghasilkan informasi yang

sesuai dengan tujuan surveilans yang ditetapkan.

Dinas Kesehatan Provinsi Bali saat ini menjalin Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bali serta PT. Angkasa Pura I untuk melakukan protokol kesehatan dan skrining di pelabuhan dan bandara. Hal ini mengingat bahwa pelabuhan dan bandara merupakan gerbang utama bagi wisatawan untuk masuk ke wilayah Bali. Tidak menutup kemungkinan bahwa wisatawan tersebut membawa virus SARS-CoV-2 ke wilayah Bali, sehingga perlu dilakukan skrining di awal. Apabila terdeteksi bahwa wisatawan membawa virus SARS-CoV-2, maka Pelabuhan dan bandara memberikan rekomendasi untuk melakukan isolasi mandiri bagi wisatawan di fasilitas yang telah disediakan.

3. Tahap Pasca Bencana

Dalam tahapan ini mencakup pemulihan, rehabilitasi dan juga rekonstruksi.

a. Pemulihan (Recovery)

Pemulihan adalah rangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang pasca pandemic COVID-19. Pemulihan yang dilakukan adalah menghilangkan trauma di masyarakat dengan melakukan edukasi dan penyuluhan secara merata.

b. Rehabilitasi (rehabilitation)

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat hingga tingkat yang memadai pada wilayah pasca COVID-19. Saat ini seluruh unit pelayanan kesehatan di Provinsi Bali menerapkan new normal dengan melakukan pelayanan seperti biasa sebelum ada pandemic COVID-19 namun dengan tambahan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah lonjakan penularan COVID-19 di instansi pelayanan kesehatan.

c. Rekonstruksi (reconstruction)

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana dengan baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Hal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali adalah kembali melengkapi fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) mengingat saat pandemi COVID-19 sempat terjadi kekosongan obat, kekurangan alat dan sebagainya. Untuk menghindari hal tersebut maka dilakukan upaya pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan.

KESIMPULAN

Dinas Kesehatan Provinsi Bali melaksanakan mitigasi bencana berdasarkan prosedur manajemen bencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, mengingat pandemic COVID-19 merupakan bencana yang dialami oleh semua negara di dunia. Surveilans kesehatan merupakan program kegawatdaruratan yang menjadi dasar keputusan tindakan pemangku kebijakan. Surveilans kesehatan juga diselenggarakan oleh seluruh unit penyelenggara Surveilans Kesehatan baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berupa pertukaran data dan informasi epidemiologi, serta peningkatan kemampuan Surveilans

Perlu dilakukan surveilans secara terus menerus dan tidak lengah meskipun situasi COVID-19 saat ini mulai landai. Perlu dilakukan jejaring surveilans kesehatan dan kemitraan dengan pihak swasta , LSM, organisasi profesi sehingga upaya mitigasi dan surveilans kesehatan data berjalan dengan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

[1] WHO. Penyakit virus corona (COVID-19). From World Health Organization: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab 1. 2023.

- [2] Purwahita, A. R., Wardhana, P. B., Ardiasa, I. K., & Winia, I. M. Dampak Covid-19 terhadap Pariwisata Bali Ditinjau dari Sektor Sosial, Ekonomi dan Lingkungan (Suatu Tinjauan Pustaka). 2023; Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata Vol. 1 No. 2, 68-80.
- [3] Kemenkes. Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. From Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download /Situasi_Terkini_221120.pdf
- [4] Paramita, I. B., & Putra, I. G. New Normal Bagi Pariwisata Bali di Masa Pandemi Covid-19. 2021; Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya.
- [5] Pramono, J. Strategi Pengembangan Health and Wellness di Bali. 2013; Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, dan Kewirausahaan Vol. 7 No. 1, 66-74.
- [6] Kusuma, I. D. Wacana Pariwisata Bali dalam Pusaran Pandemi COVID-19. 2021; Jurnal Cakrawarti Vol. 3 No. 2, 40-47.
- [7] Permenkes. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surveilans Kesehatan. 2014; Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- [8] Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Data Primer. Denpasar: Dinas Kesehatan Provinsi Bali. 2023.
- [9] Manyukwe, C. Disease outbreaks plague Zimbabwe, The Herald, Harare. 2009.